



KAJIAN WANITA

LAPORAN KEGIATAN

**ANALISIS KESENJANGAN JENDER PADA ASPEK
KEBIJAKAN, KURIKULUM DAN SUMBERDAYA MANUSIA
PADA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
STUDI DI KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH**

Oleh :

Ir. SUYATNO, MKes.

**Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda, Studi Kajian Wanita dan
Sosial Keagamaan, No. 103/P4T/DPPM/DM,SKW,SOSAG/III/2001 Tgl 25 Maret 2004**

**PUSAT PENELITIAN GENDER/PSW
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
NOPEMBER, 2004**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN KAJIAN WANITA


1. a. Judul Penelitian : Analisis Kesenjangan Jender pada Aspek Kebijakan, Kurikulum dan Sumber Daya Manusia di Pendidikan Taman-Kanak-kanak (TK). Studi di Kota Semarang- Jawa Tengah
- b. Bidang Ilmu : Kajian Wanita
- c. Katagori Penelitian : Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Ir. Suyatno, MKes.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Gol. pangkat & NIP : Gol. III-B, NIP. 132090148
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas : -
- g. Pusat penelitian : Puslit Gender (PSW) - Lembaga Penelitian UNDIP
3. Susunan Tim Peneliti :
- Anggota : - orang
4. Lokasi Penelitian : Kodia Semarang
5. Kerjasama dengan intitusi lain : -
6. Lama Penelitian : 8 bulan
7. Biaya yang diperlukan
- a. Sumber dari Depdiknas : Rp. 6.000.000,-
- b. Sumber lain : -
- Jumlah : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)


Semarang, 5 Nopember 2004

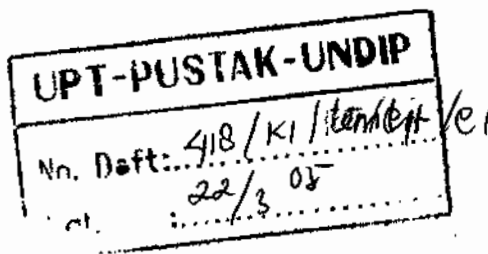
Mengetahui :

Ketua Puslit Gender/PSW UNDIP

Peneliti Utama :


Dra. V.G. Tinuk Istiarti, MKes.
NIP. 131764483


Ir. Suyatno, MKes
NIP. 132090148



RINGKASAN

ANALISIS KESENJANGAN JENDER PADA ASPEK KEBIJAKAN, KURIKULUM DAN SUMBERDAYA MANUSIA PADA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) STUDI DI KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH
Suyatno; 2004; 31 Halaman

Latar Belakang: Secara Hukum dan kebijakan tidak pembedaan perlakuan dan pemberian kesempatan bagi wanita dan pria dalam meningkatkan pendidikan, tetapi pada kenyataannya pendidikan wanita lebih rendah dibanding pendidikan pria. Akses dan partisipasi wanita dalam pendidikan lebih rendah daripada pria. Perbedaan pendidikan dan perlakuan yang bias jender tersebut terjadi karena pendidikan yang dilakukan belum memperhatikan keseimbangan jender maupun kemitraan yang harmonis antara pria dan wanita. Disamping itu kemungkinan pula terjadi bias jender dalam masukan (kebijakan, kurikulum dan sumber daya) dan proses pendidikan. Taman Kanak-kanak (TK) sebagai tahapan pendidikan prasekolah merupakan *start of point* dalam menanamkan nilai-nilai yang tidak mengandung diskriminasi jender.

Tujuan: (1) Menganalisis profil jender dari sumber daya manusia yang terlibat dalam proses Pendidikan TK. (2) Menganalisis kebijakan pemerintah daerah/dinas pendidikan dan di tingkat sekolah yang dapat berimplikasi pada kesenjangan jender pada Pendidikan TK. (3) menganalisis kurikulum dan proses pembelajaran yang mempengaruhi kesenjangan jender pada Pendidikan TK.

Metode: Dalam penelitian ini digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Analisis profil jender pada sumber daya manusia pendidikan TK didasarkan pada data sekunder dari Pusat Data/Informasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah/dinas dan di tingkat sekolah yang dapat berimplikasi pada kesenjangan jender di Pendidikan TK, dilakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan pejabat di Dinas Pendidikan, serta Pesatuan Guru TK di Kota Semarang. Untuk mengevaluasi bentuk dan materi kurikulum, serta proses pembelajaran yang mempengaruhi kesenjangan jender, maka sasaran penelitian adalah pimpinan TK yang telah terpilih menjadi sampel

penelitian, yaitu sebuah TK Umum dan sebuah TK berbasis Agama Islam. Semua data yang terkumpulkan dianalisis secara diskriptif.

Hasil: terdapat 588 buah TK yang terdiri 0,34 % TK negeri, 97,6 % TK Swasta dan TK-Luar Biasa (2,04 %). Jumlah perempuan yang menjadi kepala sekolah TK (98,21 %) lebih banyak dibanding laki-laki (1,79 %), dan jumlah perempuan yang menjadi guru TK (95,72 %) lebih banyak dibandingkan laki-laki (4,28 %). Jumlah siswa TK laki-laki dan perempuan di Kota Semarang relatif berimbang.

Kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan Kota berlaku universal tidak mengandung bias gender, namun kebijakan pada tingkat sekolah dalam hal penerimaan guru kelas terutama pada TK yang berbasis agama Islam berpotensi menyebabkan terjadinya kesenjangan gender, karena hanya memberikan kesempatan kepada guru perempuan untuk dapat diterima sebagai guru tetap. Kurikulum untuk pendidikan Taman Kanak-kanak tidak mengandung bias gender, akan tetapi pada sejumlah buku bantu ajar masih terdapat bias gender, karena terdapat perbedaan perempuan dan laki-laki pada peran publik dan domestik. Pada TK berbasis agama siswa mulai dikenalkan dengan konsep hubungan mukrim dan tidak mukrim, sehingga pada sejumlah acara pembelajaran terjadi pemisahan antara kelompok laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan: terdapat bias gender dan ketidak setaraan dalam aspek sumberdaya manusia pendidikan taman kanak-kanak, dimana perempuan lebih mendominasi posisi sebagai kepala sekolah dan guru kelas. Namun akses siswa laki-laki dan perempuan pada pendidikan taman kanak-kanak relatif tidak berbeda. Terdapat sejumlah kebijakan di level sekolah yang memiliki potensi bias gender.

Saran: Perlu dibuat model penyelenggaraan pendidikan TK yang lebih memberikan kemitrasejajaran yang harmonis dan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

SUMMARY

GENDER GAP ANALYSIS ON THE EDUCATIONAL ASPECT (POLICY, CURRICULUM AND HUMAN RESOURCES ASPECT) ON THE KINDERGARTENS IN SEMARANG MUNICIPALITY – CENTRAL JAVA

Suyatno; 2004; 31 Page

Background: According to the law and policy there should be no distinction in the treatment and availability of opportunities for women and men in order to further their education, in reality, however, women education is lower than the men. Women's access participation in education is lower than the men. The differentiation and treatment in education that gender bias, happens because existing education programs so far neither paid attention to a balanced gender perspective nor to harmonious partnership between women and men. Also, because there is a gender bias on education input (policy, curriculum, and human resources) and education process. A Kindergarten is a step of pre school education that a start of point to initiate values that do not contain gender discrimination.

Objectives: (1) Analyzed the gender profile of human resources that related in the kindergarten education process (2) Analyzed the government and school policy that have a bias gender effects on the kindergarten education (3) Analyzed the curriculum and education process that have a bias gender effects on the kindergarten education

Method: This research use two approach, namely quantitative approach and qualitative approach. Analyzed the gender profile of human resources based on secondary data form education central data information in the local department of educational in Semarang. Evaluate the government policy (local educational sector) and the school level that have bias gender effects, done by interview with head of kindergarten and some persons in the local department of educational and in the group of kindergarten teacher in Semarang City. Evaluate the kind and substance of curriculum and education process that have a bias gender effects, was carried out with two subject of kindergarten i.e. a general kindergarten (state owner) and a private kindergarten based on religion mission. Using descriptive analysis did all of collected data

Result: There were 588 kindergarten in Semarang Municipality include: state owner (0,34 %), private (97,6 %) and others/for special student (2,04 %). The amount of women became as a head of kindergarten (98,21 %) more then men (1,79 %), also, the amount of women became as kindergarten teacher (95,72 %) more than men (4,28 %). The amount of boy and girl as kindergarten student in Semarang Municipality was not different. Educational policy in the local/city department level was universal; there was not bias gender, but policy in the school level content a potential bias gender, especially in new teacher selection in the kindergarten based on religion mission, because only women could be acceptable position as a fixed teacher. Kindergarten Curriculum was not bias gender, but there was a gender bias in compulsory books, because there was a differentiation between the role of women and men in public and domestic sector.

In the kindergarten based on Islamic religion, the student was introduces with “muchrim” concept, so there was several moment make separate groups between boys and girls.

Conclusion: There was bias gender and human resources imbalance in the kindergarten management, women more dominant than men in position as the head and teachers of kindergarten in Semarang. Furthermore, there was a differentiation access between girls and boys as a student in kindergarten. But there is policy in the school level has a potential bias gender, especially in recruitment new fixed teacher.

Recommendations : an kindergarten educational model needs to be developed that which more give harmonious partnership and a balanced gender perspective between women and men.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Pada penelitian ini kami bermaksud mengungkapkan fenomena kesejangan jender pada Pendidikan TK Umum dan TK Berbasis Agama di Kota Semarang - Jawa Tengah, Untuk itu kami berusaha mengumpulkan data profil jender untuk Pendidikan TK yang ada di Dinas Pendidikan dan melakukan observasi dan wawancara dengan banyak pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan TK di Kota Semarang.

Dengan selesainya penelitian ini perkenan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Para pimpinan Universitas Diponegoro, yang meliputi: Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian UNDIP dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada tim peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini
2. Pimpinan dan Jajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah, terutama di Bidang Pendidikan Dasar telah banyak membantu terlaksananya penelitian ini dan kesediannya untuk diwawancarai dan menyediakan data-data yang kami perlukan.
3. Ibu-ibu Guru dan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina dan TK IT Harapan Bunda yang bersedia menjadi responden penelitian
4. Semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah bekerjasama dan membantu penelitian ini.

Walaupun upaya maksimal telah dilaksanakan, namun kami menyadari akan segala keterbatasan yang ada, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu masukan berbagai pihak sangat penulis harapkan dan kami berharap semoga karya ini bermanfaat.

Semarang, Nopember 2004

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	iix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
1. Jender	4
2. Jender dan Pendidikan.	5
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sasaran dan lokasi Penelitian.....	10
3. Alat dan Bahan.....	10
4. Cara Penelitian.....	11
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
1. Gambaran Umum Lokasi	13
2. Profil jender dari sumber daya manusia yang terlibat	14
dalam proses pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK)	
3. Kebijakan pemerintah daerah/dinas pendidikan dalam perspektif jender.....	19
4. Kebijakan pendidikan tingkat sekolah pada TK Umum dan TK Berbasis	21
Agama dalam perspektif jender.	
5. Kurikulum pada TK Umum dan TK Berbasis Agama dalam	24
perspektif jender.	

6. Proses pembelajaran pada TK Umum dan TK Berbasis Agama dalam perspektif jender	27
BAB VI. KESIMPILAN DAN SARAN	30
1. Kesimpulan	30
2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jumlah TK se-Kota Semarang Tahun 2004.	13
Tabel 2. Distribusi Kepala Sekolah TK di Kota Semarang menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 3. Distribusi Guru TK di Kota Semarang menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel 4. Hasil Analisis Kebijakan di tingkat sekolah pada TK umum dan TK berbasis Agama.	21

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya merupakan pembangunan sumber daya manusia, karena melalui pendidikan maka kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri akan dapat diwujudkan. Sejauh ini perhatian pemerintah dalam pembangunan pendidikan sangat besar. Setelah berhasil dalam memberantas buta huruf, pemerintah sejak tahun anggaran 1973/1974 melaksanakan program Inpres Sekolah Dasar, dan dilanjutkan penancangan wajib belajar enam tahun pada tahun 1984. Berlandaskan Undang-Undang No 2 tahun 1992, maka pemerintah pada tahun 1994 memberlakukan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai lanjutan wajib belajar enam tahun, dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan dasar yang lebih bermutu dan menjangkau penduduk di daerah terpencil (BPS, 1996). Diharapkan pada tahun 2004 hampir semua penduduk yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Jika dilihat dari sistem pendidikan nasional dan perundangan/kebijakan pendidikan yang berlaku, sebenarnya tidak ada perbedaan gender dalam pendidikan, artinya bahwa baik laki-laki ataupun perempuan di mana saja dan dari semua kelompok sosial ekonomi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memasuki jenjang pendidikan yang ada. Namun demikian, dari berbagai penelitian dan data di masyarakat ternyata masih ditemukan adanya ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan yang ditandai perbedaan akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Dari data Profil Statistik dan Indikator Gender di Jawa Tengah misalnya, diketahui selama kurun waktu 1996-1999 ternyata persentase penduduk perempuan berumur 10-44 tahun yang buta huruf masih dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, meskipun sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat pada tahun-tahun terakhir, namun Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan usia kuliah (19-24 tahun) masih lebih rendah dibanding laki-laki (Syahboedin & Suyatno, 2001).

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan bukan-lah upaya mudah, karena terkait dengan norma dan budaya masyarakat. Salah

satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui bidang pendidikan. Melalui proses pendidikan maka dapat disosialisasikan nilai-nilai baru bagi masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan jender di bidang pendidikan.

Menurut Pannen, *et.al*, (dalam Maryastuti dkk. 1999), sebagai sebuah sistem, pendidikan memperoleh masukan dari supra sistem dan memberi keluaran kepada supra sistem. Masukan yang diperoleh dari supra sistem terdiri dari tata nilai, cita-cita dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu diperoleh pula dari orang yang akan menjadi siswa atau mahasiswa, guru atau dosen dan personalia lain dalam pendidikan, serta materi pendidikan). Berpijak dari pendapat tersebut, berarti untuk bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender di bidang pendidikan dan di bidang lain, maka jenis masukan berupa kebijakan, kurikulum dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan sudah seharusnya tidak mengandung kesenjangan (bias) jender.

Masukan dan proses pendidikan yang bias jender akan menimbulkan stereotipe-stereotipe peran laki-laki dan perempuan yang kurang menguntungkan posisi sosial-politik perempuan. Jika kondisi yang tidak menguntungkan perempuan tersebut berlangsung terus menerus dan tidak dilakukan perubahan maka akan merugikan perempuan dan menyebabkan diskriminasi jender yang semakin meluas serta menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Satu penelitian yang dilakukan Kota Yogyakarta, Maryastuti dkk (1999) menunjukkan masih adanya perbedaan pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh orang tua dan guru, maupun melalui buku pelajaran di sekolah (SLTA), terutama buku pelajaran wajib Bahasa Indonesia dan Matematika. Kenyataan ini menunjukkan potensi kesenjangan jender dalam bidang pendidikan kita masih besar.

Dari sekian banyak jenjang pendidikan yang ada, Taman Kanak-kanak (TK) merupakan *start of point* harus dilalui peserta didik dalam menempuh pendidikan formal, sebelum mereka masuk sekolah dasar dan seterusnya ke sekolah lanjutan serta melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagai tahap awal proses pendidikan formal, Taman Kanak-kanak (TK) menduduki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai yang tidak mengandung diskriminasi jender. Namun demikian, perhatian para

pemerhati/peneliti gender terhadap jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau pra-sekolah dasar masih kurang sehingga permasalahan bias gender belum banyak terungkap bahkan nyaris terabaikan.

Kenyataan menunjukkan, saat ini keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) demikian menjamur, seiring dengan meningkatkan kesadaran para orang tua untuk menyiapkan anak-anaknya sebelum memasuki gerbang pendidikan formal sekolah dasar. Banyak organisasi kemasyarakatan dan agama yang menyelenggarakan jenis pendidikan Taman Kanak-kanak, sehingga corak muatan kurikulum pendidikan dan pola pengajarannya bervariasi, meskipun sudah ada aturan dari dinas terkait.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka peneliti memandang perlu untuk melakukan analisis gender terhadap masukan (kebijakan, kurikulum dan sumber daya) dan proses pendidikan yang kemungkinan berimplikasi terhadap kesenjangan gender di tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Mengingat adanya perbedaan misi dan visi pendidikan, maka kajian akan dilakukan dengan melakukan pada Taman Kanak-Kanak yang berbasis Agama dan Taman Kanak-Kanak Umum.

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Apakah kebijakan, kurikulum dan sumber daya manusia di Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum dan Berbasis Agama di Semarang-Jawa Tengah terdapat kesenjangan/bias gender?"